

Berita	: Tindak Tegas Pelanggar Aset
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Senin, 4 Juni 2018

Tindak Tegas Pelanggar Aset

DPRD Dorong Pemkot Bandung Lakukan Tindakan Hukum

BANDUNG, (PR).-

DPRD Kota Bandung mendorong Pemkot Bandung lebih tegas dalam mengelola aset. Berbagai dugaan pelanggaran dalam sewa-menyewa aset yang sudah berlangsung bertahun-tahun harus segera dihentikan lewat tindakan hukum yang tepat.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahrurroji menyatakan, pemkot harus mengambil tindakan tegas untuk setiap pelanggaran sewa-menyewa aset. Tanpa tindakan tepat dalam koridor hukum, masalah ini akan terus mendera pemkot dalam tahun-tahun mendatang.

"Harus ada kajian hukum yang

tuntas, lalu ditindaklanjuti dengan ketegasan penindakan di lapangan. Jangan terus-menerus ragu melakukan tindakan. Ini harus segera dimulai," kata Ade yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Minggu (3/6/2018) sore.

Ade meyakini, kajian hukum yang kuat merupakan kunci penertiban aset. Salah satu alternatif kebijakan yang bisa diambil adalah pemutihan piutang yang memang sudah betul-betul tidak mungkin tertagih.

Menurut Ade, Pemkot Bandung pada 2015 sudah mengambil langkah tepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Aset yang melibatkan lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga Kejaksaan. Ia berharap agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih optimal.

"Sudah bukan rahasia jika ada banyak pelanggaran di lapangan. Selain para penyewa yang absen mem-

bayar selama bertahun-tahun, ada juga permasalahan terkait dengan overkontrak. Penyewa aset menyewakan lagi aset itu ke pihak ketiga untuk mencari keuntungan. Ini kan pelanggaran," tutur Ade.

Piutang sewa tanah merupakan satu dari tiga catatan utama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung 2017. Dua catatan lain diberikan untuk pencatatan nilai aset tetap dan utang jangka pendek.

DPRD, kata Ade, mendukung penuh program perbaikan pengelolaan aset. Salah satunya dengan penyediaan anggaran untuk sertifikasi dan penertiban sewa-menyewa. "Justru kalau pencatatan dan pengelolaan aset ini dianggarkan kecil, kami yang bingung. Silakan ajukan anggaran semaksimal mungkin agar kita segera bisa menuntaskan masalah menahun ini," tutur Ade.

Ade sepakat opini dari BPK bukanlah segalanya. Tidak sedikit Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bermasalah dengan kasus korupsi. Namun, ia juga sepakat bahwa opini yang baik dari BPK mempersempit peluang korupsi.

Pertahankan WTP

Sementara itu, di tengah transisi kepemimpinan, Pemkot Cimahi mempertahankan opini WTP. Raihan itu diklaim hasil kerja keras penyampaian laporan keuangan yang akuntabilitas, meski masih banyak catatan yang perlu diperbaiki.

"Opini WTP tidak memberi jaminan mutlak semuanya mulus, tapi kami berupaya menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan pemerintah dan hal ini diapresiasi pemerintah pusat," ujar Sekda Kota Cimahi M Yani. (Ririn NF, Tri Joko Her Riadi)***